

## **PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI AREA TAMAN KOTA OLEH DINAS PARIWISATA KOTA GORONTALO**

Dina Podungge<sup>1</sup>, Ellys Rachman<sup>2</sup>, Kurniadi K. Hasan<sup>3</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia<sup>2</sup>

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia<sup>3</sup>

Email: [podungged@gmail.com](mailto:podungged@gmail.com)<sup>1</sup>

---

**Abstract:** *This research aims to analyze the arrangement of street vendors in city park areas by the Gorontalo City Tourism Office. Based on the results of problem identification, it was found that the planning, implementation and supervision of street vendors was not optimal. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews and documentation. According to the type of research used, qualitative analysis techniques are used. The research results show that even though planning has been carried out, its implementation is still less effective, indicated by the presence of traders who do not comply with the provisions and locations specified. Apart from that, the supervision carried out was also considered less intensive. This research provides theoretical contributions in the development of public administration science and practical considerations for policy makers in improving the arrangement of street vendors in city park areas. It is hoped that the results of this research can become a reference for optimizing planning, implementation and monitoring strategies in order to create more orderly and attractive city parks. Based on the research results, the arrangement of street vendors in the city park area by the Gorontalo City Tourism Office needs to be optimized. Even though planning has been done, there is still room for improvement to increase the beauty of the park and the income of traders. The implementation of existing arrangements has not been effective, because some traders still do not comply with the provisions. In addition, supervision that is rarely carried out results in ineffectiveness in these arrangements. Therefore, the Tourism Office is advised to improve planning by considering environmental conditions and the needs of traders, maximizing implementation in accordance with applicable regulations, and increasing the intensity of supervision so that the management of street vendors is more effective.*

**Keywords:** *Arrangement of Street Vendors; Tourism Office, City Park*

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penataan pedagang kaki lima di area taman kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, ditemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pedagang kaki lima belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan adalah teknik analisis Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perencanaan telah dilakukan, implementasinya masih kurang efektif, ditandai dengan adanya pedagang yang tidak mematuhi ketentuan dan lokasi yang ditentukan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga dinilai kurang intensif. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan penataan pedagang kaki lima di area taman kota. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengoptimalkan strategi penataan, pelaksanaan, dan pengawasan demi menciptakan taman kota yang lebih tertib dan menarik. Berdasarkan hasil penelitian, penataan pedagang kaki lima di area taman kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo perlu dioptimalkan. Meskipun perencanaan sudah dilakukan, masih ada ruang untuk perbaikan guna meningkatkan keindahan taman dan pendapatan pedagang. Pelaksanaan penataan yang ada belum efektif, karena beberapa pedagang masih tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, pengawasan yang jarang dilakukan mengakibatkan ketidakefektifan dalam penataan tersebut. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata disarankan untuk memperbaiki perencanaan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan pedagang, memaksimalkan pelaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku, serta meningkatkan intensitas pengawasan agar penataan pedagang kaki lima lebih efektif.

**Kata Kunci:** Penataan Pedagang Kaki Lima, Dinas Pariwisata, Taman Kota

## **PENDAHULUAN**

Sektor informal memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Gorontalo. Pedagang kaki lima (PKL) sebagai bagian dari sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang terjangkau bagi masyarakat, serta menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal. Meskipun demikian, kehadiran PKL sering kali menjadi perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap tata ruang kota, kebersihan, ketertiban, dan keindahan kota.

Kota Gorontalo, sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Provinsi Gorontalo, mengalami pertumbuhan sektor informal yang pesat. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata, jumlah PKL di area taman kota mencapai sekitar 20 pedagang dengan berbagai jenis usaha. Pedagang ini berjualan di tempat strategis seperti taman kota, yang menjadi pusat interaksi sosial dan rekreasi bagi Masyarakat. Namun, di sisi lain, kehadiran mereka juga menimbulkan berbagai masalah, mulai dari kemacetan, pengurangan estetika kota, hingga masalah kebersihan lingkungan. Ketidakpatuhan beberapa pedagang terhadap peraturan lokasi yang telah ditentukan memperburuk situasi, seperti penempatan lapak di bahu jalan dan trotoar yang seharusnya bebas dari aktivitas komersial.

Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Pariwisata, telah berusaha untuk menata PKL dengan tujuan menciptakan keteraturan dan meningkatkan keindahan kota tanpa mengabaikan aspek ekonomi masyarakat. Upaya ini diwujudkan melalui kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi PKL agar tetap dapat beroperasi, namun dengan syarat mematuhi aturan mengenai lokasi dan tata letak. Selain itu, Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mereka dalam mengembangkan usahanya (Pakaya, Pariono dan Hasan, 2024).

Meski peraturan sudah diterapkan, implementasinya belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Masalah yang sering dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan pedagang terhadap penataan lokasi yang telah ditentukan, serta minimnya pengawasan dari pihak berwenang. Pengawasan yang tidak konsisten menyebabkan ketidaktertiban tetap terjadi, bahkan beberapa pedagang menempati area yang seharusnya tidak boleh digunakan untuk berjualan. Selain itu, kurangnya edukasi dan sosialisasi kepada PKL tentang pentingnya menjaga kebersihan dan tertib dalam berdagang juga menjadi faktor penghambat dalam menciptakan taman kota yang rapi dan nyaman.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam hal relokasi pedagang. Relokasi sering kali menemui hambatan karena banyak PKL yang enggan berpindah tempat karena khawatir kehilangan pelanggan tetap mereka. Hal ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi PKL dan kebutuhan masyarakat luas akan ruang publik yang bersih, aman, dan tertib.

Penataan PKL yang efektif diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kualitas ruang publik di Gorontalo, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi dari sektor informal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat lebih dalam mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dalam menata PKL di area taman kota. Dengan memahami aspek-aspek yang belum optimal, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan yang lebih efektif, demi tercapainya keseimbangan antara pembangunan ekonomi masyarakat dan terciptanya ruang publik yang nyaman dan aman bagi semua.

Penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam menata PKL di area taman kota Gorontalo. Masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan tersebut berjalan. Penataan yang efektif diharapkan dapat menciptakan taman kota yang lebih tertib, menarik, dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pedagang tanpa mengorbankan fungsi publik dari taman tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai penataan pedagang kaki lima di area taman kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, dengan tujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan ini berhasil dan apa saja faktor penghambatnya.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian dari sektor informal yang memainkan peran penting dalam perekonomian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Menurut Breman (2017), PKL adalah bentuk usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan modal terbatas. PKL menjual barang atau jasa dalam skala kecil di lokasi yang dianggap strategis, seperti trotoar, pinggir jalan, atau ruang publik lainnya.

Dalam konteks perkotaan, kehadiran PKL sering kali menjadi sumber perdebatan antara kebutuhan ekonomi mereka dan pengelolaan ruang publik yang tertib. Menurut Sihombing (2023), PKL mendukung perekonomian informal, namun keberadaan mereka sering dianggap mengganggu estetika kota dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penataan PKL bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memberikan kesempatan ekonomi bagi pedagang kecil dan menjaga keteraturan kota.

Penataan PKL meliputi perencanaan lokasi yang sesuai, pengaturan tata ruang, serta pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan ruang publik. Menurut Saputra (2024), penataan ruang kota bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. Penataan yang baik tidak hanya meningkatkan kebersihan dan keindahan kota, tetapi juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi local.

### **Perencanaan dalam Penataan PKL**

Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penataan pedagang kaki lima. Menurut Nuryasin & Mitrohardjono (2019), perencanaan adalah proses yang menentukan bagaimana tujuan organisasi akan dicapai melalui langkah-langkah sistematis. Dalam konteks penataan PKL, perencanaan meliputi penentuan lokasi, pengaturan waktu operasional, dan tata letak lapak pedagang agar tidak mengganggu fungsi ruang publik.

Perencanaan yang matang diperlukan untuk mencegah konflik penggunaan ruang publik antara PKL dan masyarakat umum. Menurut Tampubolon (2020), perencanaan yang baik harus mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk menghasilkan solusi yang berkelanjutan. Dalam penataan PKL di area taman kota Gorontalo, perencanaan harus mampu mengakomodasi kebutuhan pedagang tanpa mengorbankan estetika dan fungsi taman sebagai ruang publik.

### **Pelaksanaan dalam Penataan PKL**

Setelah perencanaan ditetapkan, pelaksanaan penataan PKL menjadi tahap yang krusial untuk memastikan aturan yang telah dibuat dapat diterapkan di lapangan. Menurut Putra et al. (2021), pelaksanaan adalah tahap di mana kebijakan dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, pemerintah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menegakkan aturan yang berlaku, seperti penentuan lokasi berjualan dan pengaturan alur lalu lintas di sekitar area PKL. Di banyak kota, pelaksanaan penataan PKL sering kali menemui tantangan, seperti resistensi dari para pedagang yang enggan mematuhi aturan baru. Oleh karena itu, pelaksanaan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif dan persuasif, agar para pedagang memahami pentingnya mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Pelaksanaan yang berhasil ditandai dengan disiplin para pedagang dalam mengikuti aturan dan menjaga kebersihan serta ketertiban di area berdagang.

### **Pengawasan dalam Penataan PKL**

Pengawasan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa penataan PKL berjalan sesuai rencana dan dapat berfungsi efektif dalam jangka panjang. Menurut Hasibuan (2019), pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan serta melakukan tindakan koreksi apabila diperlukan. Pengawasan dalam penataan PKL dapat dilakukan oleh instansi terkait, seperti Dinas Pariwisata, dengan memantau kepatuhan pedagang terhadap lokasi dan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang efektif memerlukan partisipasi dari semua pihak, termasuk petugas pemerintah, masyarakat, dan pedagang itu sendiri. Tanpa pengawasan yang ketat, pelanggaran aturan akan mudah terjadi, seperti pedagang yang berjualan di lokasi terlarang atau penempatan barang dagangan yang mengganggu akses publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan secara rutin dan konsisten agar penataan PKL dapat

mencapai tujuan yang diinginkan.

### **Kebijakan Pemerintah tentang Penataan PKL**

Kebijakan pemerintah mengenai penataan PKL sangat diperlukan untuk mengatur aktivitas ekonomi informal ini tanpa mengganggu tatanan kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberdayaan PKL harus dilakukan secara berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif dan penyediaan ruang usaha yang layak.

Di Gorontalo, penataan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang menekankan pada pemberdayaan dan penataan pedagang kaki lima agar mereka tetap dapat beroperasi dengan baik di ruang publik tanpa merusak estetika dan fungsi ruang tersebut. Penataan ini mencakup perencanaan lokasi berdagang, pelaksanaan aturan yang ketat, serta pengawasan secara berkala.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penataan pedagang kaki lima (PKL) di area taman kota Gorontalo, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian dilakukan di taman kota Gorontalo selama 6 bulan, dari Juni hingga Desember 2024. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan 7 informan, termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Seksi, 3 PKL, dan 2 konsumen. Dan Data Sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Teknik Pengumpulan Data melalui observasi pengamatan langsung di lokasi, wawancara menggunakan teknik semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi dari informan dan dokumentasi pengumpulan dokumen kebijakan dan laporan terkait penataan PKL. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, membandingkan hasil dari berbagai teknik pengumpulan data. Penelitian berfokus pada tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan PKL.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Perencanaan Penataan PKL**

Penataan pedagang kaki lima (PKL) di area taman kota Gorontalo merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pariwisata untuk menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan indah. Berdasarkan penelitian, proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo telah mencakup beberapa elemen penting seperti pemetaan lokasi yang diperbolehkan bagi PKL untuk berjualan, penyusunan aturan yang mengatur tata letak lapak, serta pemberian arahan kepada pedagang tentang kebersihan dan ketertiban. Namun, meskipun perencanaan ini telah dibuat, implementasi dari rencana tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya keterlibatan para PKL dalam proses perencanaan. Banyak pedagang yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan sehingga tidak sepenuhnya memahami tujuan dan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai hasilnya, sebagian besar PKL cenderung mengabaikan aturan yang ada dan tetap memilih lokasi berdagang yang lebih menguntungkan secara ekonomi, meskipun lokasi tersebut berada di area terlarang seperti trotoar atau jalan umum. Dari hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa perencanaan tersebut juga belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan ekonomi PKL. Lokasi yang disediakan oleh pemerintah sering kali berada di area yang jauh dari pusat keramaian, sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan para pedagang. Hal ini menimbulkan resistensi di kalangan PKL, yang pada akhirnya lebih memilih untuk menempati lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan aturan, namun lebih ramai pengunjung. Penataan ruang yang tidak memperhatikan aspek ini menyebabkan perencanaan yang baik tidak dapat berjalan dengan optimal.

Selain itu, perencanaan yang dilakukan belum dibarengi dengan pendekatan yang komprehensif terhadap dinamika sektor informal. Berdasarkan teori administrasi publik, perencanaan yang baik harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk kelompok yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Keterlibatan para PKL dalam perencanaan kebijakan ini akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap aturan yang ditetapkan dan meminimalisir pelanggaran yang sering terjadi.

### **Pelaksanaan Penataan PKL**

Pelaksanaan penataan PKL di area taman kota Gorontalo masih jauh dari harapan. Dinas Pariwisata telah menetapkan aturan terkait lokasi dan tata letak lapak PKL, namun implementasi aturan ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para pedagang. Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah adanya pelanggaran yang berulang-ulang, di mana pedagang tetap memilih lokasi di luar area yang telah ditentukan. Misalnya, banyak PKL yang berjualan di bahu jalan atau di trotoar, yang seharusnya bebas dari aktivitas komersial .

Alasan utama pelanggaran ini adalah lokasi yang ditentukan oleh pemerintah tidak dianggap strategis oleh para pedagang. Mereka merasa bahwa lokasi yang jauh dari pusat keramaian tidak akan mendatangkan banyak pelanggan, sehingga memilih untuk melanggar aturan demi menjaga stabilitas pendapatan mereka. Selain itu, beberapa pedagang mengeluhkan bahwa area yang disediakan oleh pemerintah kurang memadai dari segi fasilitas, seperti ketiadaan tempat sampah, minimnya akses listrik, dan keterbatasan ruang untuk menata barang dagangan .

Kebersihan di area lapak PKL juga menjadi isu yang sering muncul. Meskipun pedagang telah diberi arahan mengenai pentingnya menjaga kebersihan, banyak yang masih mengabaikannya. Kurangnya fasilitas pendukung seperti tempat sampah umum turut memperburuk situasi ini. Pengelolaan sampah oleh PKL tidak berjalan dengan baik, menyebabkan penumpukan sampah di sekitar area dagang, yang mengganggu estetika dan kebersihan taman.

Selain itu, pengaturan waktu operasional PKL juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini. PKL sering kali beroperasi di luar jam yang diizinkan, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti sore hari atau akhir pekan, ketika pengunjung taman lebih banyak. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dan kontrol dalam pelaksanaan masih lemah. Tanpa penegakan aturan yang tegas, kebijakan penataan tidak akan berjalan efektif.

Dari sudut pandang pelaksanaan kebijakan publik, proses implementasi yang tidak optimal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan yang dirancang dengan realitas di lapangan. Teori pelaksanaan kebijakan (policy implementation) menggarisbawahi pentingnya pelibatan semua pemangku kepentingan, serta pengawasan yang konsisten untuk memastikan kebijakan dapat dijalankan sesuai rencana.

### **Pengawasan Penataan PKL**

Pengawasan merupakan salah satu aspek penting dalam penataan PKL di taman kota Gorontalo. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dinilai belum cukup intensif untuk memastikan kepatuhan PKL terhadap aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan lebih banyak difokuskan pada pengumpulan retribusi daripada pemantauan terhadap pelanggaran tata ruang atau kebersihan.

Petugas pengawas yang ditugaskan untuk memantau aktivitas PKL sering kali kurang terlihat di lapangan, sehingga pedagang merasa tidak ada kontrol yang ketat terhadap aktivitas mereka. Beberapa PKL mengaku bahwa meskipun ada petugas yang datang, pengawasan lebih bersifat sementara dan tidak ada sanksi tegas yang diterapkan bagi mereka yang melanggar aturan. Hal ini memberikan ruang bagi pedagang untuk terus melanggar aturan tanpa konsekuensi yang signifikan.

Kelemahan dalam pengawasan juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Dinas Pariwisata dan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang seharusnya ikut membantu dalam menegakkan aturan di lapangan. Koordinasi yang tidak berjalan baik mengakibatkan proses penegakan hukum menjadi lemah, sehingga pedagang yang melanggar aturan sering kali tidak mendapatkan tindakan tegas.

Dari sudut pandang teori pengawasan dalam administrasi publik, pengawasan yang lemah ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem manajemen dan pemantauan kebijakan. Pengawasan yang efektif harus mencakup pemantauan yang rutin, pemberian sanksi yang jelas, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebijakan.

### **Faktor Penghambat Penataan PKL**

Penelitian ini menemukan beberapa faktor utama yang menghambat keberhasilan penataan PKL di area taman kota Gorontalo:

Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Banyak PKL yang tidak sepenuhnya memahami aturan yang berlaku karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Edukasi yang minim membuat para pedagang tidak memiliki kesadaran penuh akan pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan.

Kendala Ekonomi Pedagang: PKL memilih lokasi yang tidak sesuai aturan karena mempertimbangkan potensi pendapatan mereka. Lokasi yang lebih ramai, meskipun terlarang, dianggap dapat meningkatkan pendapatan harian, sehingga mereka bersedia mengambil risiko melanggar aturan.

Kurangnya Fasilitas Pendukung: Ketidakterdediaan fasilitas seperti tempat sampah, akses listrik, dan ruang dagang yang memadai membuat PKL tidak dapat beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan .

Sanksi yang Tidak Tegak: Ketidakberhasilan penegakan sanksi bagi PKL yang melanggar membuat aturan yang ada menjadi kurang efektif. Pedagang tidak merasa adanya konsekuensi yang signifikan jika mereka melanggar aturan, sehingga pelanggaran terus terjadi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penataan PKL di taman kota Gorontalo masih jauh dari optimal. Meski perencanaan telah dilakukan, implementasinya menghadapi banyak kendala yang menghambat keberhasilan kebijakan. Perencanaan yang tidak melibatkan PKL secara aktif serta pelaksanaan yang tidak disertai pengawasan yang ketat menjadi faktor utama dalam ketidakefektifan penataan ini.

Perencanaan salah satu isu utama dalam penelitian ini karena menjadi fondasi untuk penataan pedagang kaki lima di area taman kota Gorontalo. Perencanaan yang baik mencakup identifikasi lokasi yang tepat, penetapan aturan yang jelas, serta penyampaian informasi kepada pedagang mengenai ketentuan yang berlaku. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa perencanaan yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari ketidakpatuhan pedagang dalam menempati lokasi yang ditentukan, yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Kondisi ini disebabkan oleh minimnya pemantauan dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas, yang mengakibatkan banyak pedagang tidak memahami sepenuhnya aturan dan konsekuensi pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki proses perencanaan, termasuk peningkatan pengawasan dan sosialisasi, agar penataan pedagang kaki lima dapat berjalan lebih optimal. Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan dapat tercipta area taman kota yang tertib, bersih, dan nyaman bagi semua pengunjung.

Pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di area taman kota Gorontalo menjadi isu penting dalam penelitian ini, karena keberhasilan penataan sangat bergantung pada kepatuhan pedagang terhadap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata. Sayangnya, banyak pedagang yang tidak mematuhi aturan tersebut, yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan keindahan taman kota. Ketidakpatuhan ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai aturan yang berlaku. Banyak pedagang yang tidak sepenuhnya menyadari lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan atau konsekuensi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar Dinas Pariwisata meningkatkan pengawasan dan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima. Dengan memberikan informasi yang jelas dan pelatihan mengenai ketentuan yang berlaku, diharapkan para pedagang dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan, sehingga pelaksanaan penataan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya area taman kota yang tertib dan nyaman bagi pengunjung.

Pengawasan merupakan isu krusial dalam penelitian ini, mengingat efektivitas pengawasan terhadap penataan pedagang kaki lima di area taman kota Gorontalo masih tergolong rendah. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pelanggan dan penataan yang tidak optimal, yang berpotensi menimbulkan ketidaktertiban, kebersihan yang buruk, serta menurunnya kenyamanan bagi baik konsumen maupun pedagang. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah kurangnya frekuensi dan konsistensi dalam pemantauan oleh Dinas Pariwisata dan instansi terkait. Akibatnya, pengawasan menjadi jarang dan tidak menyeluruh, sehingga pelanggaran terhadap ketentuan yang ada sulit terdeteksi dan ditangani. Untuk memperbaiki situasi ini, disarankan agar Dinas Pariwisata menetapkan jadwal rutin untuk pengawasan, yang melibatkan petugas dari dinas tersebut dan instansi terkait. Dengan pengawasan yang dilakukan secara konsisten, diharapkan penataan pedagang kaki lima dapat lebih teratur dan meningkatkan kenyamanan serta kebersihan area taman kota, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Taman Kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, dapat disimpulkan perencanaan masih perlu dioptimalkan. Karena penataan pedagang kaki lima di area taman kota merupakan bagian dari program kerja Dinas Pariwisata yang selalu dilakukan setiap tahun, hal ini dilakukan agar taman kota yang ditempati oleh pedagang kaki lima, selain dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai pedagang juga menambah keindahan Kota Gorontalo. Pelaksanaan sudah dilakukan, namun belum efektif dilaksanakan. Karena masih ada saja pedagang kaki lima yang ada di area taman kota tidak taat kepada ketentuan yang telah di tentukan oleh petugas Dinas Pariwisata. pengawasan sudah dilakukan, namun belum efektif dilaksanakan. Karena pengawasan atau pemantauan yang dilakuka instansi terkait dalam hal ini Dina Pariwisata dan Dinas Perindustrian mengenai pentaan pedagang kaki lima di area taman kota masih jarang dilakukan.

## SARAN

Dinas pariwisata perlu mengoptimalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan pedagang kaki lima di area taman kota dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan pedagang. Perencanaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada, pelaksanaan harus mengacu pada peraturan yang berlaku, dan pengawasan intensif diperlukan agar penataan pedagang lebih efektif dan sesuai harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara.
- Nuryasin, M., & Mitrohardjono, M. (2019). Strategi Perencanaan Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 77–84.
- Nusi, R. S. A., Rachman, E., & Antu, Y. (2023). Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Gorontalo (Studi Kasus Penataan Pasar Rakyat Duingingi). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 8194–8202.
- Pakaya, N. A., Pariono, A., & Hasan, K. K. (2024). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Pedagang Pasar Tradisional di Kecamatan Ponele Kabupaten Gorontalo Utara. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 14110-14116.
- Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
- Putra, S. W., Abubakar, M., & Abubakar, R. (2021). Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 11–19.
- Saputra, M. R. E. (2024). Perizinan dalam Kebijakan Tata Ruang: Upaya Mengakomodasi Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Lingkungan pada Perkebunan Kentang di Kabupaten Wonosobo. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 109–118.
- Sihombing, S. M. H. (2023). Evaluasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Pasar Kota (Studi Kasus: Gang Siku). Universitas Jambi.
- Tampubolon, M. P. (2020). *Change Management: Manajemen Perubahan: Individu, Tim Kerja, Organisasi*. Mitra Wacana Media.
- Thahir, B. (2023). Memahami Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(1), 102–115.